

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
(Studi Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di
Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih
Kota Probolinggo, Jawa Timur)**

Yuni Catur Wulan¹, Nurul Umi Ati², Roni Pindahanto Widodo³

*Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan keadaan kemiskinan di Kota Probolinggo berdasarkan data-data yang diperoleh. Fokus dalam penelitian ini adalah Potensi Kelompok Bersama binaan dari Kemensos dan Dinas Sosial, Peran serta Pemerintah Kota Probolinggo dalam penanggulangan Kemiskinan, serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung KPM yang terjadi di daerah tersebut. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, serta observasi. Tahap analisa dilakukan dimulai dari proses pemilihan data-data yang diperlukan, kemudian data disusun dan disajikan, selanjutnya ditarik kesimpulan. Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, sesungguhnya dirasakan sebagai salah satu strategi yang cukup ampuh untuk mengatasi berbagai gejala dari perubahan struktural di sektor industri dan pertanian serta mengurangi dampak terjadinya kemiskinan. Sebagai akibat dari berkurangnya lapangan pekerjaan dalam usaha tani di pedesaan maupun di wilayah perkotaan, juga berpengaruh terhadap kaum wanita sebagai salah satu komponen rumah tangga. Atas dasar hal tersebut diatas, saat ini Kementrian Sosial RI sedang gencar memberikan stimulan bantuan pendirian e-Warong dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sasaran utama dari stimulan bantuan tersebut adalah para peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dari program ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mensejahterakan peserta PKH pada khususnya, para penerima manfaat di sekitar lokasi KUBE dan e-Warong. Dengan berkelompok, permasalahan yang di hadapi akan dibicarakan bersama. Tidak hanya permasalahan dalam bertetangga sehari-hari. Dari terbentuknya kelompok ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bagi anggota kelompok pada khususnya. Oleh karena itu bantuan permodalan bagi kelompok sangat penting bagi pertumbuhan usaha produktif anggota kelompok tersebut.

Kata Kunci : KUBE, PKH, Program Pengentasan Kemiskin

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat kompleks, multidimensi serta menjadi permasalahan yang dihadapi oleh hampir sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Jumlah orang miskin tidak sepenuhnya berkurang, bahkan kemiskinan dapat di gambarkan telah bertransformasi menjadi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Di Indonesia kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang di hadapi oleh Pemerintah, meskipun berbagai program telah masih belum berjalan sebagaimana di harapkan.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan antar kebijakan program yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan maupun Program yang dilaksanakan harus berpihak dan memberdayakan masyarakat sehingga tidak menempatkan masyarakat miskin semata-mata sebagai obyek dari pembangunan. Dengan demikian maka upaya penanggulangan kemiskinan, perlu lebih melibatkan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan sehingga di harapkan masyarakat miskin akan berdaya dan mampu melaksanakan sendiri program pembangunan yang ditujukan kepada mereka.

Progra yang bersifat *top down* juga memiliki kelemahan lain yang sering ditemui dalam pelaksanaannya seperti salah sasaran, adanya kepentingan pejabat/aparat serta menjadikan masyarakat miskin tergantung pada bantuan yang di berikan. Disamping itu dampak lain yang juga muncul sebagai akibat dari program seperti ini adalah berkurangnya nilai – nilai budaya yang ada di masyarakat seperti sifat gotong royong, rasa kepedulian dan kebersamaan maupun nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Dengan demikian maka di butuhkan pemahaman dan yang jelas mengenai kondisi kemiskinan yang ada di setiap wilayah sehingga upaya yang akan di laksanakan menjadi lebih terarah dan efektif. Program pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui program pemberdayaan upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya sebatas memberikan bantuan langsung kepada penduduk miskin. Program ini juga melibatkan masyarakat miskin dalam membangun kualitas hidupnya melalui pengembangan potensi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat sebagai pelaku dalam pembangunan.

Salah satu kendala dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya motivasi dari masyarakat miskin untuk mengambil peran dalam upaya pengembangan. Salah satu hambatan dalam pemberdayaan masyarakat adalah adanya dominasi kaum elite dalam menentukan jalannya program. Akibatnya, hasil kegiatan justru tidak menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Selain itu, ada fenomena bahwa proses pemberdayaan masyarakat terkadang menimbulkan ketergantungan masyarakat

pada berbagai stimulan dari luar yang seringkali justru di manfaatkan untuk kepentingan konsumtif. Kegiatan usaha sektor informal yang dilakukan oleh masyarakat kecil merupakan kegiatan ekonomi yang mampu menopang penghidupan masyarakat. Meskipun dikatakan sebagai sektor informal, namun dapat berdampak pada meningkatnya perekonomian nasional dan global. Hal ini dapat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat kecil karena keseluruhan aktifitas usaha umumnya melibatkan komunitas masyarakat lokal dan memutar roda perekonomian di okasi usaha tersebut. Demi mensukseskan hal tersebut di atas, saat ini Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial sedang gencar memberikan stimulan bantuan pendirian e-Warong dan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa. Sasaran utama dari stimulan bantuan tersebut adalah para peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dari e-Warong dan KUBE Jasa ini, diharapkan bisa bermanfaat untuk mensejahterakan peserta PKH pada khususnya, dan warga penerima manfaat di sekitar lokasi e-Warong pada umumnya. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat kompleks multidimensi yang disebabkan oleh berbagai faktor pemicunya. Kemiskinan muncul oleh berbagai faktor misalnya: ketersediaan lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan dan kesehatan, rendahnya kemampuan dan ketrampilan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi menyeluruh dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Probolinggo.
2. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan. KUBE di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang di teliti dan berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau

kepercayaan orang yang di teliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Penelitian deskriptif kualitatif di rancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sedang berlangsung. Metode ini dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu untuk memperoleh pemahaman yang sebenarnya mengenai Implementasi Kebijakan Penanggulangan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Wonoasih. Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini adalah penelitian *crossectional*, karena penelitian ini hanya dilakukan dalam satu waktu. Penelitian ini hanya digunakan dalam waktu yang tertentu yaitu pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2019 dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Walaupun penelitian dilakukan dalam satu waktu tertentu tidak dibatasi pada hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan tahun saja akan tetapi sampai penelitian itu selesai. Jadi ketika peneliti merasa ada data-data yang kurang maka peneliti akan kembali ke lapangan untuk melengkapi data yang di perlukan (Prasetyo dan Jannah, 2005). Penelitian ini berlangsung di wilayah Kecamatan Wonoasih yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin dan tingkatan ekonomi yang masih rendah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Wonoasih merupakan salah satu dari lima kecamatan yang ada di kota Probolinggo. Kecamatan Wonoasih terletak pada 7°48' lintang selatan dan 113°12' bujur timur, dengan ketinggian daerah 16m sampai dengan 12m dari permukaan laut. Kecamatan Wonoasih terbagi menjadi 6 kelurahan yaitu kelurahan Wonoasih, kelurahan Jrebeng Kidul, kelurahan Pakistaji, kelurahan Kedunggaleng, kelurahan Kedung Asem, dan kelurahan Sumber Taman. Kelurahan Kedung Asem merupakan kelurahan terluas (3,145km²) dan kelurahan Wonoasih merupakan kelurahan terkecil (0,843km²). Kecamatan Wonoasih merupakan bagian dari unsur Perangkat Daerah Kota Probolinggo, dimana dalam sistem pemerintahannya dipimpin oleh Camat dengan tingkat Eselon III a yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Probolinggo. Sebagai pusat pemerintahan kecamatan, kantor kecamatan Wonoasih kota Probolinggo beralamat di Jalan Jeruk No.1 Kota Probolinggo. Kecamatan Wonoasih merupakan salah satu dari lima kecamatan se-kota Probolinggo yang membawahi 6 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Wonoasih
2. Kelurahan Jrebeng Kidul
3. Kelurahan Pakistaji

4. Kelurahan Kedunggaleng
5. Kelurahan Kedung Asem
6. Kelurahan Sumber Taman

Kemiskinan merupakan tanggungjawab dari pemerintah pusat (negara) dan pemerintah daerah. Kewajiban dan tanggungjawab ini merujuk pada UUD 1945 pasal 34. Atas dasar itulah, maka penanggulangan kemiskinan merupakan tugas negara, dimana merujuk pada sistem pemerintahan Indonesia saat ini yang tidak lagi menerapkan sistem kebijakan pusat, maka otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah bagian dari pelaksana kebijakan pusat dengan memperhatikan kemampuan-kemampuan lokal bidang keuangan dan sumber daya lainnya untuk meneruskan pembangunan nasional. Untuk secara bersama-sama menanggulangi masalah kemiskinan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan tersebut menindaklanjuti atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan disesuaikan dengan masalah yang dihadapi setiap pemerintah daerah. Permasalahan penanggulangan kemiskinan hakekatnya adalah merupakan tanggungjawab dari pemerintah (negara) untuk dapat mensejahterakan penduduknya, keluar dari penderitaan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan nasional harus berorientasi dan berpihak kepada masyarakat miskin.

Kota Probolinggo adalah salah satu pemerintah daerah (Pemda) yang juga memiliki permasalahan kemiskinan yang harus dapat ditanggulangnya untuk dapat me sejahterahkan penduduknya. Dalam hal upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di kota Probolinggo, maka pemerintah kota Probolinggo telah mengeluarkan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan penanggulangan kemiskinan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jumlah penduduk miskin di kota Probolinggo sampai dengan akhir tahun 2018 adalah 16.900 jiwa atau 7,20%.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial Republik Indonesia khususnya pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemsikina yang bertujuan untuk membedakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui Program Bantuan Langsung Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulan dan pendampingan. Program KUBE merupakan salah satu strategi kementerian sosial untuk memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan keuangan mikro.

Ada beberapa syarat pembentukan dan keanggotaan KUBE, yaitu:

- Prioritas utama KUBE produktif atau berkembang yang daerah di bantu dana dekonsentrasi atau APBD atau masyarakat atau dunia usaha;
- Setiap KUBE beranggotakan berjumlah 10 KK
- Anggota berusia antara 15-55 tahun dan sudah berkeluarga;
- Memiliki kegiatan sosial dan UEP;
- KUBE yang sudah memiliki pembukuan atau catatan keuangan;

Pada tahun 2017, kota Probolinggo mendapatkan kesempatan melaksanakan program KUBE. Sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan bagi keluarga sangat miskin melalui Program Keluarga Harapan, melalui surat Direktur Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan / Perkotaan: 304/ DYS-PK/ PKPKD/05/2014 tanggal 20 Mei perihal usulan KUBE-PKH kohort 2012 tahun 2017 dengan tujuan untuk mewujudkan komplementaritas program bagi para peserta. PKH kohort 2012 yang masuk dalam kategori Transisi Kelompok Usaha Bersama “KHAZANAH” mengajukan bantuan dana untuk meningkatkan penghasilan keluarga pada tahun 2018.

Meningkatnya peranan sektor perdagangan, industri, dan jasa dalam sistem perekonomian Indonesia, maka kesempatan tenaga kerja di sektor pertanian lambat laun menunjukkan kecenderungan penurunan khususnya peralihan dari sektor pertanian ke non-pertanian yang terjadi dengan cepat pada periode 1970-an dan kemudian melambat pada tahun 1980-an. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Kecenderungan tersebut menjadi salah satu indikator melemahnya sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi sebagian besar penduduk, sehingga pada akhirnya peranan pekerjaan di sektor non-pertanian menjadi sangat penting (Ken Suratijah dkk, 1996). Proses pembangunan pertanian khususnya di pedesaan maupun di wilayah perkotaan telah pula menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja di pedesaan maupun di wilayah perkotaan dan merangsang timbulnya usaha-usaha non-pertanian diantaranya sektor perdagangan, industri kecil/rumah tangga termasuk industri kerajinan yang merupakan komoditas spesifik lokalita di beberapa daerah.

Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, sesungguhnya dirasakan sebagai salah satu strategi yang cukup ampuh untuk mengatasi berbagai gejolak dari perubahan struktural di sektor industri dan pertanian serta untuk mengurangi dampak terjadinya kemiskinan. Sebagai akibat dari berkurangnya lapangan pekerjaan dalam usaha tani di pedesaan

maupun di satu komponen rumah tangga. Pada akhirnya kaum wanita mencari pekerjaan ke luar sektor pertanian. Berangkat dari inilah, maka KUBE “KHAZANAH” didirikan, yang terdiri dari anggota peserta PKH yang masuk kedalam kategori transisi.

Kelompok usaha bersama ini kedepannya diharapkan dapat berkembang dan mampu meningkatkan taraf hidup bagi seluruh anggotanya. Dan untuk tujuan itulah, peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, sangat diperlukan melalui program-program pemberdayaan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Adapun tujuan dari KUBE “KHAZANAH”, yakni:

- Sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara mandiri, khususnya bagi anggota KUBE “KHAZANAH” yang merupakan peserta PKH kategori transisi.
- Menumbuhkan kembangkan semangat berusaha dan berikhtiar bagi anggota KUBE “KHAZANAH” dan warga masyarakat sekitarnya.
- Membina anggota KUBE “KHAZANAH” dalam kegiatan usaha yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi mereka, dengan harapan dapat meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka.
- Meningkatkan posisi tawar para anggota kelompok KUBE “KHAZANAH” di masyarakat.
- Mengembangkan jaringan usaha anggota, sehingga dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok dari usaha yang dilakukan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah para anggota KUBE “KHAZANAH” yang beranggotakan peserta PKH kohort 2012 yang masuk dalam kategori transisi, yang tergabung dalam KUBE “KHAZANAH”.

Identitas kelompok :

- Pengurus dan Anggota Kelompok
 - Ketua : Slamet Sari
 - Sekretaris : Siyati
 - Bendahara : Supik
 - Anggota :
 - Nur Aini
 - Rini
 - Siani
 - Misni
 - Nuraini
 - Nur Hayati
 - Munik
- Alamat Kelompok

KUBE “KHAZANAH” ini berdomisili di Dusun Gerbu RW 005, kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
- Bentuk Usaha Kelompok

Ternak dan Pengembang biakkan Kambing

Program KUBE yang telah diimplementasikan wilayah kota Probolinggo sejak tahun 2016. Kecamatan Wonoasih sebagai *pilot project* implementasi KUBE di kota Probolinggo dapat memberikan gambaran bagaimana kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah penting yang harus ditanggulangi oleh pemerintah sesuai dengan amanat UUD 1945 sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Sasaran pemberdayaan itu adalah terciptanya manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sasaran jangka panjang, kedua sasaran ini ditegaskan kembali dengan menggaris bawahi terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju, modern, dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila.

Kebijakan program KUBE di kota Probolinggo merupakan suatu bentuk dari usaha pemerintah untuk meminimalisasi angka kemiskinan di kota Probolinggo. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Beberapa penyebab seperti laju pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, selain itu bencana alam, serta konflik yang berkepanjangan.

KUBE “KHAZANAH” ini membuka usaha ternak atau penggemukan kambing merupakan alternatif yang tepat karena membuka usaha bisnis ini adalah pilihan yang hampir tidak mengandung resiko tinggi, dikarenakan kebutuhan akan bahan pokok seperti rumput (pakan kambing) dan katul untuk campuran minum cukup tersedia, karena wilayah tersebut merupakan lahan pertanian yang dimungkinkan tersedianya bahan pakan dan di sekeliling wilayah kelurahan Pakistaji banyak lahan pertanian dan perkebunan dengan bahan pakan ternak hijau cukup tersedia. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian dan keuletan, serta kemauan untuk menjaga tingkat hidup hewan ternak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Program KUBE merupakan salah satu strategi Kementerian Sosial untuk memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan lembaga keuangan mikro. Program itu dilakukan dengan pemberian modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan keterampilan, bimbingan motivasi usaha dan pendampingan. KUBE ini disertai dengan adanya pendampingan, sehingga usaha yang digeluti KUBE dapat berkembang dengan optimal

dan kesejahteraan anggotanya akan meningkat. Keberadaan pendamping KUBE ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pendamping KUBE memiliki peranan yang sangat strategis, yakni sebagai narasumber, penggerak sekaligus sebagai fasilitator bagi pemberdayaan keluarga miskin. Sudah barang tentu untuk dapat melaksanakan tugas yang cukup berat tersebut para pendamping harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Pelaksanaan kelompok usaha bersama di kota Probolinggo mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Sejak tahun itu, jumlah KUBE meningkat seiring dengan adanya sosialisasi dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial terkait. Implementasi program ini dimulai dengan adanya suatu analisis tentang bagaimana kondisi kemiskinan yang ada di wilayah tersebut dalam kasus ini adalah wilayah Kota Probolinggo. Dalam perkembangannya KUBE di wilayah ini telah tercipta sebanyak 30 KUBE dengan kegiatan yang beragam.

Tak ada gading yang tak retak beginilah gambaran pada implementasi program ini, banyaknya jenis usaha macet dikarenakan pendampingan yang kurang membuat program ini seakan sia-sia dan menimbulkan masalah baru. Selain itu, pembentukan KUBE yang dilakukan oleh sebagian pihak yang memiliki kepentingan serta masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan anggota juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program ini. Kurangnya keterampilan yang diberikan dan Bantuan yang diterima tidak utuh, selain itu bantuan yang diberikan diadakan melalui pihak ketiga.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. KUBE sebaiknya berhubungan baik dengan Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS) sehingga sinergi diantara dua lembaga ini dapat berkelanjutan dan berkembang. Hal ini diharapkan sangat membantu KUBE dalam masalah keuangan dan kemitraan terhadap pihak luar.
2. Pelaksanaan sosialisasi program ini harus disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan program yang akan diberikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui program yang diluncurkan. Sosialisasi program harus dilakukan terhadap beberapa kelompok sasaran, seperti: lurah, tokoh masyarakat, warga secara umum, dan terutama kelompok calon sasaran.

3. Sebelum pemberdayaan diberikan hal yang penting dilakukan seperti penilaian terhadap kebutuhan kelompok sasaran, apa kebutuhan yang diperlukan yang sangat mendesak. Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini sangat terkait dengan jenis usaha yang dikembangkan. Dalam konsepnya ada jenis usaha yang bersifat harian, ada yang bersifat semesteran dan ada yang bersifat tahunan sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam kerangka teoritik.
4. Pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga efektivitas KUBE dalam meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sarasannya secara lebih besar. Pelatihan Pendamping. Demikian juga dengan pendamping perlu diberikan pelatihan yang terkait dengan *substansi jenis usaha* yang dikembangkan oleh KUBE yang menjadi binaannya. Materi dimulai dari bagaimana manajemen pengelolaan KUBE, pengembangan jenis usaha, pengguliran, supervisi, hingga melakukan evaluasi. Tidak bisa hanya didasarkan pada pengalaman yang ada. Selain itu, *pengembangan komitmen* para pendamping juga menjadi hal yang penting, karena pengalaman menunjukkan banyak para pendamping kurang serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Pengelolaan usaha yang cukup berhasil tanpa pemasaran tidak berarti apa-apa. Produksi yang sudah dihasilkan harus dipasarkan sehingga mendapat untung. Karena itu, sebelum jenis usaha ditentukan perlu pertimbangan pasar secara matang. Pasar disini tidak selalu berarti pasar tradisional atau modern tempat orang berkumpul. Pasar adalah adanya transaksi dari seorang atau sekelompok pembeli yang mau membeli produksi yang dihasilkan KUBE

- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Puji M. 2012. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI JAKARTA SELATAN. Universitas Indonesia.
- Marselinus B. 2016. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN NUNUKAN. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Keputusan Menteri Sosial No. 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Keluarga Miskin
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Official Website Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo.
<https://probolinggokota.bps.go.id> diakses pada bulan April tahun 2019
- Official Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo.
<https://dispenduk.probolinggokota.go.id> diakses pada bulan April tahun 2019
- Data dari Dinas Sosial Kota Probolinggo

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen E, James.1997.*Public policy Making, Third Edition*.New York : Holt Rinchart and Winston.
- Brian W. Hogwood.1978. *Policy Analysis For The Real World*.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mazmanian, Daniel A and Pauk A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA : Scott Foresman and Company.